

PARADIGMA

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora

Universitas Banda Naira

GERAKAN SOSIAL 1771 DI BLAMBANGAN**NURMARIA**

Dosen Sejarah Peradaban Islam UIN Salatiga

Email : maria.nur54@yahoo.com

ABSTRAK

Blambangan merupakan daerah yang terletak di perbatasan antara pulau Jawa dan pulau Bali, sekarang dikenal dengan Kabupaten Banyuwangi. Daerah perbatasan yang dihuni oleh suku osing, madura, jawa dan bali ini sering terjadi konflik. Salah satu konflik tersebut berupa gerakan sosial politik yang dilakukan oleh Rempek Jagapati terhadap VOC pada tahun 1771-1772. Lebih lanjut lagi informasi mengenai gerakan sosial-politik tersebut akan dijelaskan dengan mengangkat beberapa pokok permasalahan sebagai berikut; Pertama, Mengapa muncul gerakan sosial-politik di Blambangan?; Kedua, Bagaimana intensitas terjadinya gerakan sosial-politik tersebut?; Ketiga, Apa saja akibat dari gerakan sosial-politik bagi perubahan sosial di Blambangan? Melalui penggunaan metode sejarah, yang diawali dengan proses heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji munculnya, intensitas dan akibat gerakan sosial politik tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *collective behavior*. Berbagai perspektif mengenai gerakan ini dibangun dengan memanfaatkan sumber-sumber VOC, babad dan kajian historis mengenai Blambangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, gerakan sosial politik di Blambangan terjadi karena adanya beberapa alasan, dari segi politik, sosial, etnis, agama maupun ekonomi. Intensitas gerakan terjadi sekitar empat belas bulan, yaitu mulai dari Agustus 1771 - Oktober 1772 dengan menewaskan beberapa tentara VOC dan kaum pribumi. Akhirnya, VOC melakukan berbagai strategi baik kompromi dengan pemimpin gerakan, mendatangkan pasukan perang dari Jawa dan Madura maupun melakukan gencatan senjata untuk menghentikannya.

Kata Kunci : *Gerakan Sosial, Rempek Jagapati, VOC, Blambangan*

PENDAHULUAN

Fenomena sejarah di Blambangan pada abad ke-18, yaitu terjadinya gerakan sosial yang dilakukan masyarakat pribumi terhadap VOC. Kemunculan karya I Made Sujana dan Sri Margana, memperkuat adanya peristiwa gerakan sosial menegangkan yang terjadi di Blambangan secara ilmiah. Tidak berhenti pada penerbitan karya ilmiah, upaya untuk membangkitkan aktivitas penelusuran sejarah lokal dan artefak-artefak peninggalan sejarah terus disuarakan, misalnya, dengan membangun monumen di tempat bersejarah, memburu dan mencari makam tokoh penggerak terjadinya gerakan sosial tersebut dan juga memvisualisasikan tokoh dalam bentuk lukisan (Margana, 2012, Lembaran Kebudayaan 24: 7). Tidak berhenti pada makam dan lukisan, usaha masyarakat Banyuwangi semakin meningkat dengan menerbitkan buku biografi tokoh penggerak tersebut, melalui

PARADIGMA

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora
Universitas Banda Naira

kerjasama dengan sejarawan dan budayawan lokal.

Tokoh penggerak terjadinya gerakan sosial pada tahun 1771 di Blambangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Rempek Jagapati. Rempek, berdasarkan sumber lokal dikenal sebagai Jagapati, seorang pemuda yang mempunyai titisan dari Wong Agung Wilis¹ dan melanjutkan perjuangannya. Berdasarkan sumber kolonial, Rempek Jagapati dikenal sebagai *Pseudo-Wilis* (Wilis Palsu), seorang abdi yang berkhianat kepada Bupati Jaksanegara, dan kemudian bergabung dengan pasukan pemberontak di Bayu. Berdasarkan sumber VOC, perlawanan yang dilakukan oleh Rempek sangat berbahaya, menguras banyak tenaga dan membutuhkan banyak biaya untuk menumpasnya. Intensitas perlawanannya juga berlangsung lama dibandingkan dengan perlawanan yang dilakukan oleh Wong Agung Wilis dan Sayu Wiwit² (Lekkerkerker, 1923: 37).

Beberapa sejarawan juga mempunyai pendapat yang berbeda mengenai perlawanan Rempek Jagapati. Seperti I Made Sujana, memandang perlawanan Rempek Jagapati sebagai reaksi politik terhadap observasi VOC di Blambangan, dan mengungkap tokoh sebagai panglima perang, adanya polemik politik sebagai pemicu perlawanan tersebut. Akan tetapi, dalam disertasi Margana muncul kesan berbeda, yaitu dengan menghadirkan faktor sosial dan religi sebagai benih-benih perlawanan tersebut. Sedangkan penelitian ini akan melihat perlawanan Rempek Jagapati dari sudut pandang gerakan sosial-politik.

Apa yang dipaparkan di atas menimbulkan beberapa pertanyaan, sehingga peneliti tertarik untuk mencari penjelasan (eksplanasi) tentang peristiwa tersebut dan menuangkannya dalam sebuah artikel yang berjudul "Gerakan Sosial-Politik di Blambangan Tahun 1771-1772". Lingkup geografisnya adalah Blambangan, yang saat ini berada di Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu, lingkup temporalnya diambil pada 1771 adalah tahun ketika gerakan sosial terjadi dan diakhiri 1772 setelah VOC berhasil membunuh Rempek Jagapati selaku pemimpin gerakan sosial tersebut. Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan yang hendak dijawab adalah sebagai berikut : 1. Mengapa muncul gerakan sosial-politik di Blambangan?; 2. Bagaimana intensitas terjadinya gerakan sosial-politik tersebut?; 3. Apa saja akibat dari gerakan sosial-politik bagi kehidupan masyarakat di Blambangan?

¹ Wong Agung Wilis adalah tokoh penggerak pada pemberontakan masyarakat pribumi Blambangan terhadap kekuasaan kompeni pada tahun 1767-1768.

² Sayu Wiwit adalah putri dari Wong Agung Wilis yang melakukan pemberontakan di Blambangan bagian barat pada tahun

PARADIGMA

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora
Universitas Banda Naira

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Melalui metode sejarah, tulisan ini diharapkan mampu menampilkan suatu rekonstruksi sejarah dengan tingkat objektivitas semaksimal mungkin. Metode sejarah terdiri dari 4 tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Garraghan, 1957: 34; Kosim, 1984: 36; Gottschalk, 1985: 32; Renier, 1997: 113; Lubis, 2015: 15).

Heuristik sebagai tahap pertama dalam metode sejarah adalah kegiatan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, dan jejak masa lampau. Sumber-sumber yang dihimpun mengacu pada tiga jenis sumber, yakni sumber tertulis, lisan, benda (Garraghan, 1957: 103; Gottschalk, 1985: 35-40; Renier, 1997: 104; Kuntowijoyo, 2013: 73-76; Lubis, 2015: 7). Sumber-sumber tertulis dapat berupa arsip, sumber resmi tercetak, dokumen, artikel sezaman, tradisi lisan baik tertulis maupun lisan, buku, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, artikel yang dimuat dalam jurnal atau surat kabar.

Sumber-sumber berupa arsip, sumber resmi tercetak, dokumen, artikel sezaman dapat ditelusuri di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, dan melalui akses online pada situs KITLV. Sumber-sumber primer yang digunakan berupa kumpulan naskah-naskah arsip lama yang disusun dan diterbitkan oleh De Jonge, berjudul *De Opkomst Van Het Nederladsch Gezag Over Java*. Arsip tersebut berupa surat-surat yang keluar masuk dari Kerajaan Blambangan, laporan para residen Blambangan dari tahun 1771- 1772 kepada Gubernur Jenderal di Batavia, memori pergantian tugas para residen Blambangan. Sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini berupa kumpulan tulisan C. Lekkerkerker yang berjudul *Balambangan*. Selain itu, juga digunakan sumber lokal, berupa babad. Babad yang sudah ditemukan adalah Babad Blambangan dan Babad Wilis. Babad Blambangan membahas enam topik, yaitu Wilis, Sembar, Tawang Alun, Bayu, Mas Sepuh, dan Notodiningrat. Babad ini digunakan untuk membangun sebuah perspektif lokal. Sumber lain yang digunakan dalam penulisan artikel ini berupa *Overgekomen Brieven en Papieren* (Surat-surat dan Laporan yang diterima) yang tersimpan di Nationaal Archief (NA), yang sudah diolah dalam disertasi dan buku S. Margana yang berjudul *Perebutan Hegemoni Blambangan*.

PARADIGMA

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora

Universitas Banda Naira

Tahap kedua adalah kritik baik secara internal maupun eksternal. Kritik sering disebut juga verifikasi atau keabsahan sumber (Kuntowijoyo, 2013: 77; Lubis, 2015: 25). Kritik harus dilakukan agar penulis tidak menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber tersebut (Sjamsuddin, 2012: 103). Dalam tahap ini, ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, meneliti otentisitas sumber atau keaslian sumber disebut kritik eksternal. Kedua, meneliti kredibilitas sumber yang disebut kritik internal (Kuntowijoyo, 2013: 77-78). Kritik eksternal dilakukan untuk mencegah sejarawan menggunakan sumber palsu atau menipu. Sementara dalam kritik internal hanya dapat dilakukan terhadap penulisan yang ada dalam dokumendokumen atau pada inskripsi pada monumen, mata uang, medali atau stempel (Renier, 1997: 116). Setelah sumber-sumber tersebut dikritik sumber tersebut dikoroborasikan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain sehingga melahirkan sebuah fakta sejarah yang mendekati kebenaran. Tidak hanya berhenti sampai di sana fakta tersebut tidak dapat berbicara sendiri tanpa adanya sentuhan dari penulis kecuali pada sumber yang tidak ada kontradiksi atau dikenal dengan sebutan *argumentum ex silentio* (Garraghan, 1957: 294; Gottschalk, 1985: 116; Lubis, 2015: 34-35).

Tahap ketiga disebut interpretasi yang bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu sintesis dan analisis. Interpretasi sering disebut biangnya subjektivitas karena dalam proses ini masuk pemikiran-pemikiran penulis atas suatu fakta sejarah. Fakta-fakta tersebut dirangkai menjadi suatu rentetan tak terputus dari suatu peristiwa. Dalam penulisan sejarah subjektivitas itu diakui namun subjektivitas itu harus dihindari (Ankersmit, 1987: 331; Kuntowijoyo, 2013: 78). Interpretasi merupakan sebuah tahapan yang cukup sulit karena penulis harus bersikap netral terhadap sumber yang ada. Oleh karena itu, penulis harus mengambil jarak dengan sumber agar tidak terlalu dekat dan menimbulkan bias. Dalam kedua cara tersebut ada berbagai jenis interpretasi, mulai dari interpretasi verbal, teknis, logis, psikologis, dan faktual (Garraghan, 1957: 321-337; Lubis, 2015: 36-39).

Tahap keempat adalah penulisan yang disebut historiografi yang merupakan tahapan terakhir dalam metode sejarah (Gottschalk, 1985: 32; Lubis, 2015: 55). Dalam tahap ini yang diperlukan adalah kemampuan menulis. Sebuah tulisan yang kreatif tentu membutuhkan kecerdasan dan imajinasi. Kecerdasan di sini berarti bersikap kritis pada setiap sumber disertai dengan analisis yang tajam. Imajinasi di

PARADIGMA

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora
Universitas Banda Naira

sini berarti penulis harus mampu membayangkan bagaimana sebuah peristiwa terjadi sehingga menghasilkan sebuah historiografi yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Penyebab Terjadinya Gerakan Sosial**

Terdapat beberapa penyebab terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh Rempek Jagapati pada tahun 1771. Penyebab tersebut terjadi pada aspek budaya, religi, ekonomi, dan politik. Menurut Smelser, ada enam determinan yang harus dipenuhi untuk terjadinya sebuah gerakan sosial (Smelser, 1969: 15-17). Empat diantaranya dapat digunakan untuk menelisik faktor penyebab terjadinya perlawanan yang dilakukan Rempek Jagapati di Blambangan pada tahun 1771. Empat faktor tersebut yaitu:

1). *Structural conduciveness* (kekondusifan struktural). Di dalam kasus gerakan sosial di Blambangan ini, teori Smelser dapat menjelaskan bagaimana kekondusifan struktural yang terjadi di Blambangan, yaitu terjadinya penindasan yang dilakukan oleh VOC di Blambangan, baik yang dialami oleh rakyat jelata maupun keluarga penguasa lokal, khususnya terkait aspek ekonomi, yaitu berupa perampasan hasil pertanian dan aspek politik yang berupa penurunan penguasa lokal dari kekuasaannya berdasarkan keputusan sepihak dari VOC.

2). *Structural strain* (ketegangan struktural). Gerakan sosial yang dilakukan masyarakat Banyuwangi, yang dipimpin oleh Rempek Jagapati, memiliki beberapa hal yang menjadi ketegangan struktural. Dalam bidang ekonomi, misalnya, terjadinya kelaparan di kalangan rakyat jelata, karena sebagian besar hasil pertanian mereka harus dijual pada VOC. Dalam bidang politik, tergesernya para keturunan pemimpin lokal dari posisinya atas dasar pengambilalihan kekuasaan secara sepihak oleh VOC sehingga rakyat cukup dipusingkan dengan biaya hidup sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan untuk anak. Keadaan seperti ini menimbulkan dua implikasi yaitu: a) Terjadi keresahan di kalangan rakyat karena mereka harus bertahan hidup di tengah kesulitan ekonomi pada saat itu. b) Perasaan tertekan juga dialami penguasa tradisional yang terpinggirkan karena mereka merasa dirugikan dan ingin menyingkirkan penguasa pengganti beserta akar-akarnya (VOC).

3). *Growth and spread of generalized belief* (perkembangan dan penyebaran keyakinan yang beredar). Dalam kasus gerakan sosial di Blambangan terdapat

PARADIGMA

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora
Universitas Banda Naira

keyakinan umum yang berupa kecemburuan sosial terhadap VOC yang dianggap merugikan ekonomi masyarakat setempat. Kecemburuan-kecemburuan yang mendasari terjadinya gerakan sosial antara lain: a) Adanya keyakinan yang beredar dalam masyarakat Blambangan bahwa dengan berjalannya gerakan sosial yang akan dilakukan, maka VOC akan menyerahkan kekuasaannya dan menghentikan eksploitasi hasil pertanian terhadap masyarakat Blambangan b) Selain itu penguasa tradisional yang tadinya lengser dapat memimpin Blambangan dan mengembalikan kekuasaannya.

4). *The precipitating factor* (faktor pencetus). Di dalam kasus Blambangan yang dijadikan sebagai pemicu adalah dalam keadaan sakit, Rempek Jagapati ditangkap secara paksa oleh VOC karena tidak mau menghadap VOC untuk melakukan perundingan, sehingga masyarakat Blambangan bertekad untuk melawan VOC, karena dengan melawan VOC mereka tidak akan kehilangan apa-apa lagi kecuali nyawa.

B. Intensitas Terjadinya Gerakan Sosial**1. Profil Rempek Jagapati**

Babad Blambangan dan Babad Tawang Alun menyebutkan bahwa Rempek Jagapati ketika masih kanak-kanak bernama Ki Mas Rempek. Nama sebutan Ki Mas, menunjukkan bahwa seseorang itu masih keturunan bangsawan. Berdasarkan pohon keluarga yang ditemukan dalam Babad Tawang Alun, Ki Mas Rempek adalah keturunan dari cucu Tawang Alun II, yang bernama *Mas Bagus Dalem Wiraguna*. Ibu Ki Rempek adalah selir dari *Mas Bagus Dalem Wiraguna*, yang berasal dari Bali dan menetap di Desa Pakis (Arifin, 1995: 113; Darusuprpto, 1984: 50). Mas Bagus Dalem Wiraguna juga merupakan keturunan dari seorang selir. Dia mempunyai tujuh orang anak, yaitu Mas Suratman, Mas Alit, Mas Talib, Mas Ayu Nawangsari, Mas Ayu Rahinten, Mas Ayu Patih, dan istri dari selir lahirlah Mas Rempek (Putu Prabadarana, makalah, 1993: 31).

Berdasarkan sumber kolonial, nama Rempek Jagapati dikenal dengan sebutan *Pseudo Wilis* atau Wilis Palsu, Si Suci Wilis. Sosok yang mempunyai sifat anti Belanda karena selalu ingin memberontak. Sikap memberontak yang bersemayam pada diri Mas Rempek ini dapat dilihat pada masa mudanya. Sebagai anak dari seorang selir, ia memiliki kehidupan yang keras, tidak tinggal di istana seperti saudara-saudaranya, sehingga ia tidak pernah menikmati gemerlapnya fasilitas seorang bangsawan. Mas Rempek tinggal di Desa Pakis, setiap hari

PARADIGMA

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora
Universitas Banda Naira

berinteraksi dengan rakyat biasa, mengetahui penderitaan dan persoalan masyarakat secara langsung. Rempek Jagapati menjadi seorang punakawan Samila (saudara kandung Bupati Jaksanegara).

Pada masa pengabdianya di rumah Bapa Samila, Mas Rempek mendapati kehidupan bupati dan para pembesar VOC di Blambangan yang kelam, penuh penghianatan dan membuat dia prihatin. Bupati Jaksanegara dianggap mencintai dan berselingkuh dengan istri Samila. Mengetahui hal tersebut, Rempek berusaha menghalangi usaha Jaksanegara untuk mempersunting istri Samila. Oleh karena itu, Jaksanegara sangat mengecam Rempek dan berusaha membunuhnya. Meskipun usaha tersebut selalu gagal.

Suatu hari Rempek Jagapati dituduh memiliki hubungan dengan selir Jaksanegara. Mendengar hal tersebut, Jaksanegara merasa cemburu dan melampiaskan kemarahannya dengan menganiaya Rempek Jagapati. Atas penganiayaan tersebut, Rempek merasa kecewa dan melarikan diri ke Bayu. Selama menetap di Bayu, Rempek dipelihara oleh seorang petapa, yang dahulu merupakan tokoh agama di Blambangan. Petapa tersebut bernama Manik Rupa, yang sekaligus menjadi penasihat spiritualnya. Di bawah petunjuk petapa ini, Rempek Jagapati mengangkat dirinya sebagai pemimpin baru yang akan membebaskan rakyat Blambangan dari belenggu Jaksanegara selaku utusan VOC (VOC 3337, 16 Oktober 1771. Folio 264-266 dalam Margana, 2012: 191).

Untuk melegitimasi masa, Rempek menyatakan bahwa didalam dirinya bersemayam roh Wong Agung Wilis (Arifin, 1995: 89). Bersemayamnya roh Wong Agung Wilis ini dapat dimaknai bahwa terdapat kesamaan ide dan perjuangan antara Rempek Jagapati dengan Wong Agung Wilis. Bentuk pakaian dan tindakannya diubah semirip mungkin dengan Wong Agung Wilis. Rempek juga berjanji akan melanjutkan perjuangan Wong Agung Wilis dan akan membebaskan para *wadwa alit* dari semua penyerahan wajib yang dilakukan oleh VOC dengan diwakilkan oleh Jaksanegara. Benar saja, dengan cara ini, Rempek Jagapati dapat menarik simpati rakyat Blambangan (Sujana, 2001: 68-69).

Kepercayaan dan keyakinan masyarakat melahirkan harapan baru yang selama ini dinanti masyarakat Blambangan. Bapa Rapa selalu menyebarkan isu menitisnya roh Wong Agung Wilis di dalam tubuh Rempek, sehingga para pengikutnya menjadi semakin banyak dan setia. Kepercayaan tersebut yang menjadi modal awal masyarakat untuk selalu semangat berjuang melawan

PARADIGMA

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora

Universitas Banda Naira

Jaksanegara dan VOC, meskipun mereka menyadari bahwa kekuatan senjata yang dimiliki masih sangat terbatas jumlahnya. Rempek Jagapati dan pengikutnya hanya mengandalkan tombak, lembing, keris serta pedang. Sedangkan pihak VOC memiliki senapan dan juga meriam.

Keadaan tersebut membuat Mas Rempek memikirkan cara untuk memperoleh bantuan dari para diaspora, karena di Blambangan terdapat orang Cina dan Bugis yang mempunyai kepentingan berdagang. Alternatif bantuan dari diaspora yang dipikirkan Rempek ternyata mengalami kegagalan. Langkah selanjutnya untuk membangun semangat moral dan kepercayaan masyarakat, Rempek mengatakan bahwa Gusti Allah akan menganugerahkan meriam kepadanya (VOC 3337: 3). Nampaknya Rempek memanfaatkan agama sebagai sandaran terakhirnya untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Akibat dari pengaruh Rempek yang disebarkan secara berkelanjutan, dukungan masa terus berdatangan. Para *bekel agung* yang tadinya setia terhadap *regen* dan VOC, dan tinggal di Kutalateg, kini berduyun-duyun menuju Bayu untuk bergabung dengan Rempek. Para *bekel agung* tersebut antara lain: Wiramanggala, Jagakarsa, dan juga Lembu Giri. Selain menyatakan memihak Rempek, para *bekel agung* juga menjanjikan sejumlah senjata. Dukungan kekuatan tersebut dimanfaatkan oleh Rempek untuk membangun Bayu.

Bayu dijadikan pusat berkumpulnya para pengikutnya dan secara kebetulan Bayu dahulu pernah menjadi tempat pertapaan Tawang Alun. Oleh karena itu dibangun sebuah benteng, dan di depan benteng tersebut terdapat pagar yang terbuat dari batang-batang pohon besar, bagian atasnya dibuat runcing dan batas-batas pohonnya berjajar sangat rapat. Di belakang pagar terdapat lubang-lubang perlindungan di dalam tanah. Di dalam benteng tersebut juga terdapat cadangan pangan yang melimpah serta dilengkapi dengan gamelan sebagai symbol kekuasaan dan kekuatan suatu kelompok. Adanya benteng, keperluan logistik dan persenjataan yang lengkap, menunjukkan kemampuan Rempek dalam mengorganisasi masa. Oleh karena itu, Rempek Jagapati diangkat oleh rakyat menjadi raja dan dianugerahi gelar Pangeran Jagapati pada sekitar 24 September 1771-6 Oktober 1771 (De Jonge, 228; Sudjana, 68-69; Sundoro, 35).

Dengan diangkatnya Rempek Jagapati sebagai raja di Bayu, maka lahirlah dualisme kekuasaan di Blambangan. Ke dua kekuasaan tersebut mempunyai cara pandang yang saling bertentangan dalam mengelola Blambangan sebagai sebuah

PARADIGMA

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora
Universitas Banda Naira

wilayah. Kelompok Rempek Jagapati memandang Blambangan sebagai sebuah kerajaan yang merdeka. Sedangkan kelompok Jaksanegara memandang Blambangan sebagai daerah kekuasaan VOC. Sehingga kedua kelompok tersebut mempunyai keinginan untuk saling menyingkirkan satu sama lain untuk dapat menguasai Blambangan secara utuh.

2. Keadaan Politik Blambangan

Ketika Belanda mengambil alih kerajaan Blambangan, mereka menjumpai sebuah masyarakat yang sudah mempunyai sejarah pemerintahan birokratis yang panjang dan sudah tersistem dengan baik dari masa ke masa. Kemudian Belanda menerapkan administrasi barat dalam mengelola kerajaan yang dahulunya bersifat tradisional tersebut. Dampaknya sistem tradisional mulai mengalami perubahan yang berangsur-angsur tapi mendasar. VOC menguasai Blambangan dengan hak atas kekuasaan yang diperolehnya dari perjanjian sepihak dengan Kerajaan Mataram. Pada 1743, Sultan Pakubuwana II menyerahkan sebagian wilayah perbatasan daerah kepada VOC. Atas dasar tersebut, VOC merasa memiliki kekuatan untuk menguasai Blambangan, yaitu dengan melahirkan rezim otoriter.

Keputusan pertama yang diambil oleh VOC adalah merubah bentuk Kerajaan Blambangan menjadi sebuah kabupaten. Tatanan birokrasi dan stratifikasi sosial di Blambangan berubah total. Keberadaan raja yang menyandang kelas tertinggi dalam stratifikasi sosial di Kerajaan Blambangan, menjadi pemimpin tunggal dan jabatannya diwariskan secara turun temurun sudah tidak berlaku lagi, posisi tersebut tergantikan oleh keberadaan bupati yang ditunjuk dan dilantik oleh VOC (Lekkerkerker, 1923: 1060; Ali, 2002: 22). Karena bupati ditunjuk dan dilantik oleh VOC, satu konsekuensi yang harus ditanggung oleh bupati tersebut adalah merosotnya kedudukan pemimpin itu sendiri. Bupati tunjukan VOC, hanya merupakan agen-agen atau “boneka” majikan mereka, VOC. Mengenai sasaran-sasaran administrasi, VOC lebih mementingkan pemasukan pajak dan pemeliharaan tata tertib daripada pembangunan sosial dan ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat setempat.

Para bupati tunjukan VOC ini, sangat merasakan kedudukan mereka sebagai bawahan VOC. Mereka bekerja di bawah pengawasan seorang residen, yang merupakan orang Belanda. Residen sendiri sering menekan para bupati untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan penyerahan wajib yang sudah

PARADIGMA

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora
Universitas Banda Naira

disepakati dan ditandatangani oleh bupati dan otoritas VOC sebelum mereka dilantik (Kartodirdjo, 1984: 144-145). Dalam dua tahun masa kekuasaannya, VOC masih menghormati sistem politik tradisional yang ada di Blambangan dengan menunjuk Mas Anom, Mas Uno, Sutanegara dan Wasengsari sebagai bupati Blambangan. Keempat bupati ini masih mempunyai keturunan dari Pangeran Tawang Alun.

Dalam hal ini, jelaslah bahwa VOC menghormati hak turun-temurun pada bupati sejauh hal itu bertepatan dengan persyaratan-persyaratan birokrasi yang esensial seperti kemampuan dan kesetiaan. Nampaknya pemberian hak turun-temurun kepada keluarga pangeran dimaksudkan untuk menjadi dukungan dan kesetiaan kepada VOC. Orang-orang itu diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab mereka terhadap VOC, dan sebagai jaminannya mereka akan diberikan pengakuan dan perlindungan atas kekuasaannya. Namun, dalam prakteknya, keempat bupati tersebut melakukan penghianatan dengan melakukan pemberontakan untuk melepaskan diri dari cengkeraman VOC. Sehingga VOC merasa memerlukan orang baru yang benar-benar dapat dipercaya untuk mengelola Blambangan. Maka didatangkanlah orang-orang dari Surabaya untuk menjadi bupati selanjutnya, bukan lagi dari keluarga pangeran.

Sampai disini kiranya sudah jelas bahwa didalam melaksanakan administrasi mereka, pihak Belanda (VOC) secara berangsur-angsur memutuskan hubungan politik yang bersifat tradisional. Transformasi dari pola kekuasaan yang tradisional ke pola kekuasaan yang legal-rasional dilaksanakan selangkah demi selangkah. Kejadian-kejadian inilah yang mengkristalkan dan mendorong tumbuhnya kekuatan-kekuatan rakyat yang sudah lemah untuk bersatu mengadakan gerakan sosial yang kuat dalam rangka menumbangkan kekuatan VOC. Maka terjadilah gerakan sosial besar-besaran pada tanggal 18 Desember 1771 yang dipimpin oleh Rempek Jagapati.

3. Kronologi Gerakan Sosial Rempek Jagapati

Gerakan sosial yang dipimpin oleh Rempek Jagapati berlangsung selama empat belas bulan. Sebelum gerakan tersebut terjadi, Rempek Jagapati telah mengadakan kontak yang erat dengan Kerajaan Bali dan para penduduk Blambangan untuk menghimpun massa. Hampir seluruh penduduk Blambangan berduyun-duyun meninggalkan desa dan mengosongkan rumahnya kemudian

PARADIGMA

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora
Universitas Banda Naira

pindah ke Bayu untuk bergabung dengan Rempek Jagapati. Akan tetapi, sebelum Rempek Jagapati melangsungkan gerakan sosial politiknya, pihak Belanda semakin menaruh rasa curiga dan akhirnya mengetahui rencana-rencananya. Pihak Belanda merasa keberadaan Rempek Jagapati dan pengikutnya dapat mengacaukan eksistensi Belanda di Blambangan karena penduduk tidak lagi dapat diatur. Sehingga konsep gerakan sosial yang umumnya pihak penggerak menghampiri musuhnya, kini berlangsung sebaliknya. Para utusan Belanda berbondong-bondong pergi ke Bayu untuk melumpuhkan Rempek Jagapati dan pengikutnya, bahkan sebelum mereka melakukan serangan sekalipun.

Pada 2 Agustus 1771, VOC mengirim pasukan sebanyak 70 orang bersenjata dipimpin oleh Kertanegara dan Jaksanegara menuju Bayu. Tujuan utama mereka adalah memisahkan penduduk Blambangan dari pengaruh Rempek Jagapati dan mengajak penduduk untuk kembali ke Blambangan. Setibanya di Bayu pada 3 Agustus 1771 terjadi pertempuran pertama. Perlawanan gigih dari Rempek Jagapati membuat Kertanegara terluka serius di bahu kirinya dan kaki kanannya terkena tembak. Mindoko, Bawalaksana, orang dari Surabaya yang setia mendampingi Kertanegara juga mengalami luka, bahkan mantri Samedirono mati tertembak dikepalanya. Oleh karena itu, Kertanegara memutuskan untuk mundur ke Kota. Pasukan yang tadinya datang bersama Kertanegara membelot kepada Rempek Jagapati dan tidak ikut kembali ke Blambangan (De Jonge, 1883: 174-175).

Pada 5 Agustus 1771, VOC menyerang Bayu dengan mengirimkan Biesheuvell, Residen Blambangan, beserta prajurit-prajurit yang dilengkapi dengan senjata berupa senapan, rantak, dan beberapa amunisi lainnya. Namun, seketika itu, VOC mengalami kekalahan dan memutuskan kembali ke Kota. Dengan siasat licik, Schophoff berfikir bahwa penduduk Bayu tidak mungkin mau menyerahkan diri apabila VOC terus menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, Schophoff pergi ke desa-desa yang letaknya dipelosok untuk membujuk rakyat supaya kembali ke Blambangan dan tidak memihak pada Rempek Jagapati.

Pada 22 September 1771, terjadilah serangan selanjutnya. Letnan Imhoff bergerak sampai pagar benteng Bayu. Mengetahui Bayu akan diserang, Rempek Jagapati menyusun strategi perang dengan membagi pasukan menjadi dua sayap. Sayap kiri terdiri dari 3000 orang, diserahkan kepada Keboundha, sayap kanan dipercayakan kepada Kidangsalindhit. Kedua pemimpin pasukan ini ingin membalas kekalahan yang dialami di Gambiran. Sementara VOC memakai strategi

PARADIGMA

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora
Universitas Banda Naira

perang dengan menempatkan pasukan pribumi dibarisan depan, sehingga pasukan pribumilah yang akan menghadapi pasukan Bayu terlebih dahulu. Akan tetapi, tiba-tiba mereka lari bersama-sama masuk hutan dan menghilang. Oleh karena itu Imhoff merasa harus menambah pasukan untuk melindungi penyerangan dari pasukan Rempek Jagapati. Namun hal tersebut mustahil untuk dilakukan, karena mereka sudah berada jauh dari Kotalateng.

Pada 14 Desember 1771, di sana terjadi pertempuran yang hebat hingga mengakibatkan terbunuhnya letnan Reygers dan terlukanya Kapten Heinrich. Sampai pada akhirnya VOC memutuskan untuk mundur lagi. Lagi-lagi VOC tidak berhasil menakhlukkan Bayu, bahkan menyentuhnya pun belum pernah dicapainya. Bayu berhasil dipertahankan oleh Rempek Jagapati dan pasukannya.

Pada 18 Desember 1771, setelah kematian Letnan Reygers, Vaandrig Van Schaar mengambil alih komando. Ia memutuskan untuk bergerak melakukan serangan ke Songgon dengan membawa 150 tentara. Rempek Jagapati merespon serangan tersebut dengan melakukan serangan umum secara dadakan terhadap pasukan VOC. Pasukan VOC berhasil dihancurkan oleh pasukan Rempek Jagapati. Bahkan Belanda sendiri menyatakan kekalahannya sebagai “*de dramatische vernietiging van Compagniesleger*”, yang artinya kekalahan dramatis terjadi dipihak Kompeni.

Pada 20 Maret 1772, Rempek Jagapati melakukan serangan ke markas VOC di Kotalateng. Dengan membawa kekuatan sebesar 1500 pasukan, bantuan 600 prajurit dari Gusti Ngurah Jembrana Bali dan 100 prajurit dari Sentong, Rempek optimis dapat merebut Kotalateng dari Belanda. Perang berlangsung begitu sengitnya, hingga menewaskan lima prajurit Jagapati yang paling berani dan lainnya mengalami luka-luka. Rempek Jagapati gagal merebut Kotalateng, bahkan ia sendiri mengalami luka dan memutuskan untuk kembali ke Bayu (VOC 3364, folio 144 dalam Margana, 2012: 177).

Pada 16 Mei 1771, Letnan Heinrich mengadakan penyerangan ke Bayu namun lagi-lagi pasukan VOC berhasil dikalahkan oleh pasukan Rempek Jagapati. Meskipun berhasil menang, Rempek Jagapati sendiri terluka akibat perang dengan Guntur Geni. Pasukan Rempek terus kehilangan semangat juang, karena suplai makanan yang semakin menipis sedangkan prajurit VOC terus bertambah jumlahnya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk kembali ke desa mereka yaitu Gambiran, Kradenan, Benculuk, Grajagan dan Purwa.

PARADIGMA

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora
Universitas Banda Naira

Pada tanggal 11 Juni 1772 Jagapati mengalami luka yang serius dan tidak dapat disembuhkan, sehingga akhirnya mati. Kabar mengenai kematian Jagapati terus menyebar luas, namun masih terdapat beberapa pemimpin prajurit yang terus bertahan di Bayu dan akan bertarung hingga mati, VOC memutuskan untuk mengirimkan bala bantuannya guna melawan sisa prajurit di Bayu yang belum menyerah. Kedatangan tentara yang jumlahnya cukup banyak ini diberitakan oleh mata-mata Bayu, sehingga penduduk Bayu merasa khawatir. Raja mereka sudah mati, kemudian Keboudha memanggil para mantri dan kepala desa untuk berunding bagaimana menghadapi musuh sebanyak itu. Perundingan terus dilakukan, tetapi VOC tidak kunjung datang menyerang Bayu. Rupanya VOC telah memutuskan untuk menyusun strategi baru guna melumpuhkan Bayu tanpa melakukan peperangan dan membuang amunisi, yaitu dengan cara memblokade pintu masuk keluar Bayu selama beberapa hari sehingga seluruh penduduk Bayu mengalami kelaparan dan kemudian mati.

Pada 12 Oktober 1772 Kapten Heinrich berhasil merebut benteng Bayu dan mengakhiri perang. Selain Kapten Heinrich yang membuat laporan mengenai keberhasilannya dalam menakhlukkan Bayu, terdapat prajurit Madura yang ikut andil dalam mencapai kemenangan tersebut. Pengejaran terhadap orang-orang Bayu yang berusaha melarikan diri banyak dilakukan oleh pasukan Madura dibawah pimpinan Pulangjiwa. Kisah para prajurit Madura tersebut dipaparkan dalam Babad Bayu sebagai berikut:

“Di barat, di utara, di selatan, orang Bayu yang melarikan diri terjaring oleh orang Madura. Orang Madura menyakiti, merampoki, dan mengumpati mereka baik laki-laki maupun perempuan. Orang Madura menganggap nasib mereka sebagai hukuman dari Tuhan”.

Setelah pasukan Madura berhasil memburu para penduduk Bayu, mereka kembali ke Madura, sepanjang perjalanan mereka membunyikan meriam sebagai tanda kemenangan telah diraih. Pulangjiwa sebagai pemimpin pasukan Madura pulang dengan membawa 40 wanita cantik-cantik sebagai persembahan untuk sang raja di Madura. Sang raja menyambut dengan suka cita, lalu ia memilih 20 wanita untuk dirinya sendiri, dan sisanya dibawa pulang oleh Pulangjiwa. Dengan demikian berakhirlah gerakan sosial-politik yang dilakukan oleh Rempek Jagapati dan pengikutnya.

PARADIGMA

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora
Universitas Banda Naira

4. Dampak Dari Perlawanan Rempek Jagapati

Gezaghebber Ujung Timur Jawa, Pieter Luzac mengusulkan adanya rekonstruksi menyeluruh atas administrasi kawasan ini, pemilihan bupati baru, relokasi ibukota Blambangan karena Kotalateng dianggap tidak sehat lagi, perubahan tatanan hukum, serta program eksploitasi ekonomi yang lebih manusiawi. Usulan ini dipertimbangkan dengan matang oleh otoritas VOC yang ada di Jakarta. Kemudian diadakan peraturan-peraturan daerah mengenai bercocok tanam dan penduduknya, serta terus mendorong semangat penduduk untuk taat terhadap aturan yang dibuat oleh VOC. Keluhan yang dirasakan masyarakat Blambangan mengenai perlakuan para pemimpin yang berasal dari Jawa menjadi evaluasi penting bagi VOC. Oleh karena itu diputuskan untuk menyingkirkan para pemimpin Jawa dari Blambangan. VOC menugaskan kepada Gubernur di Jawa Timur untuk selalu memperhatikan keadaan di daerah setelah perang usai dan agar dibuat laporan tertulis.

Keadaan kemasyarakatan setelah perang usai, sumber Belanda mengatakan terdapat orang-orang Gendong, yaitu para pelarian dari Bayu yang menetap di daerah selatan yang masih liar dan dimana manusia-manusianya masih menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit pohon-pohon. Dalam hal ini perlu dilihat pula kajian Dr Van der Tuuk mengenai orang gedong. Didalam buku kamusnya, bahasa Kawi-Bali, ia menyebut orang gedong sebagai manusia-manusia liar, dan semacam bajak laut. Jadi bisa dikatakan bahwa orang gedong itu adalah sekelompok manusia yang masih hidup liar atau “outlaws” (tanpa ikatan hukum) dalam bahasa Jawa “wong kraman”, yaitu orang-orang yang meninggalkan tempat tinggal asal mereka yaitu Bayu (TBG LXX, 1930: 98-101).

KESIMPULAN

Gerakan sosial-politik yang terjadi di Blambangan, muncul karena rasa dendam yang diakibatkan oleh keinginan penduduk untuk melepaskan diri dari cengkeraman Kolonial dan juga orang-orang Jawa. Mereka ingin posisi mereka di Blambangan kembali seperti zaman dahulu. Dimana tidak ada etnis lain yang mengatur dan memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak suka. Keberadaan bupati yang berasal dari Jawa dan keberadaan VOC di Blambangan, dianggap sebagai penjajah yang membuat hidup masyarakat Blambangan merasa tertekan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakmampuan para bupati dan

PARADIGMA

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora
Universitas Banda Naira

pejabat lainnya untuk melakukan pendekatan secara baik dan benar dengan masyarakat setempat, dan memunculkan hubungan sosial yang tidak serasi antara kedua golongan.

Terjadinya gerakan sosial-politik ini juga menunjukkan bahwa politik otoritas Belanda (VOC) bersifat keras. Tujuan untuk memikirkan kesejahteraan penduduk pribumi tersingkirkan oleh tujuan untuk menumpas gerakan rakyat. Akibatnya penguasa menjadi gegabah dalam menentukan sikap sehingga melakukan kesalahan politik yang besar. Misalnya dengan mengangkat orang-orang Jawa sebagai bupati Blambangan. Dimana keputusan politik tersebut menimbulkan persoalan yang besar bagi masyarakat Blambangan, sehingga terjadilah gerakan sosial-politik.

Gerakan sosial-politik ini dapat digolongkan sebagai gerakan yang bersifat revolusioner, dalam arti bahwa tujuannya lebih dari sekedar menghancurkan birokrasi yang korup dan tidak sesuai dengan criteria mereka. Gerakan tersebut bertujuan untuk menumbangkan sistem pemerintahan yang dibangun oleh penguasa asing. Gerakan tersebut dapat dipandang sebagai usaha untuk merebut kendali politik dari penguasa asing. Dalam adu kekuatan, pada akhirnya kekuasaan kolonial selalu menang, karena golongan-golongan gerakan sosial-politik seringkali lemah dibidang organisasi dan strategi, bahkan persenjataan, sebagaimana yang telah dikembangkan oleh penguasa-penguasa Eropa. Oleh karena itu, tidaklah salah apabila gerakan sosial-politik tersebut diberi cap “tradisional” dan mengalami kegagalan.

DAFTAR PUSTAKA

- ANRI. 1773. Laporan-Laporan Residen Banyuwangi kepada Gubernur Jenderal di Batavia Tahun 1771-1773. Jakarta: Arsip Residensi Banyuwangi No 1-9.
- Pigeaud, Th. Stukken Betreffende Onderzoek in Blambangan. TBG. LXIX/ 1929: 208-220
- Arifin, Winarsih. 1980. Babad Wilis. Laporan Penelitian. (Jakarta: Lembaga Penelitian Prancis untuk Timur Jauh: Ecole Francaise d'Extreme-Orient)
- Darusuprpta, 1984. Babad Blambangan: Pembahasan-Suntingan NaskahTerjemahan. Disertasi. (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada).
- Margana, Sri. 2007. The Struggle for Hegemony of Blambangan c 1763-1813. Disertasi. (Belanda: Universitas Leiden).
- Sudjana, I Made. 1995. Nagari Tawon Madu: Sejarah Politik Blambangan Abad XVIII. Tesis. (Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia).
- Arifin, Winarsih. 1995. Babad Blambangan. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Lekkerkerker, C. 1923. Blambangan, de Indische Gids II. Amsterdam: De Bussy

PARADIGMA

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora

Universitas Banda Naira

Pieter van Dam, 1939. Beschijvinge van de Oost-Indische Compagnie
III.

„sGravenhage

Pigeaud, TH. 1932. Aantekeningen Betreffende den Javaanschen
Oosthoek.

Amsterdam: De Bussy

Smelser, Neil. J. 1969. Theory of Collective
Behaviour. USA: Collier-Macmillan
Canada.